

Manajemen Kepemimpinan Kepala Kampung dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Mimin Distrik Oksibil Pegunungan Bintang

David D. Mimin¹, Fikstif Donal Lintong^{2*}

^{1,2} Prodi PPKn, FKIP, Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Indonesia

*Email: fikstifdonallintong@gmail.com

Diterima: 9 Juni 2026 – Disetujui: 16 Juni 2026

© 2026 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Cenderawasih

ABSTRAK

Pembangunan nasional berupaya mewujudkan rakyat Indonesia di era otonomi daerah. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang substansial kepada seluruh daerah di Indonesia untuk mengorganisasi dan mengelola daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan dan aspirasinya (desentralisasi). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kepemimpinan Manajemen Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mimin, Kecamatan Oksibil, Pegunungan Bintang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa di bidang pengelolaan diketahui dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dianggap sangat tidak memadai dalam mendukung kepemimpinan kepala desa. Faktor yang dianggap suboptimal meliputi keterampilan kepemimpinan Kepala Desa Mimin, karena responden menilai keterampilan kepemimpinan menunjukkan angka yang signifikan, mencapai 76%. Lebih lanjut, faktor yang dianggap suboptimal meliputi kemampuan kepala desa dalam mengembangkan perencanaan, di mana penilaian responden dikategorikan sebagai "buruk".

Kata Kunci: Kepemimpinan, Manajemen, Pelaksanaan Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional diupayakan untuk mewujudkan manusia Indonesia dalam era otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang cukup besar bagi semua daerah di Indonesia untuk menata dan mengurus daerahnya sesuai dengan kemampuan dan aspirasi daerahnya masing-masing (desentralisasi-dekonsentralisasi). Hal ini dimaksudkan supaya pemerintah baik pusat maupun daerah mudah menjangkau keseluruhan pelosok tanah air ini dari Sabang sampai Merauke serta menjawab semua kebutuhan daerah sesuai dengan impian masyarakat baik yang berada di pesisir, pegunungan, pulau, lembah dan pedalaman lainnya yang sulit di jangkau oleh manusia.

Hanya terdapat enam kewenangan yang diurus oleh pemerintah pusat (Dekonsentralisasi), yaitu Hubungan luar negeri, Keuangan, Pertahanan, Keamanan, Hukum dan Agama (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 7). Kewenangan Otonomi daerah yang lebih luas diberikan pula kepada dua daerah di Indonesia, yaitu wilayah Aceh dan Papua.

Aceh diberikan otonomi khusus dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Nanggro Aceh Darussalam dan Papua diberikan otonomi khusus dengan Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Khususnya untuk Papua, identitas Kepala Kampung membutuhkan partisipasi seluruh pihak, terutama masyarakat yang dipimpinnya. Masyarakat bukan hanya menjadi objek tetapi mereka adalah subjek, artinya pelaku utama dalam pembangunan disegala bidang yang di turunkan langsung oleh pemerintah baik itu dari tingkat pusat maupun daerah setempat.

Sampai sejauh mana peranan manajemen yang dijalankan oleh seorang Kepala Kampung Mimin, dapat diukur dari hasil (*output*) melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-Fungsi manajemen yang dimaksudkan dalam latar belakang ini meliputi, kemampuan seorang pemimpin (Kepala Kampung) tentang penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penggerakan serta pengawasan terhadap pekerjaan atau tugas-tugas yang dikerjakan oleh orang-orang atau staf yang dipimpinnya.

Dengan melihat kondisi kenyataan yang dialami oleh masyarakat Kampung Mimin Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, maka pada tulisan ini penulis meneliti secara khusus tentang bagaimana cara para aparatur yang mengerjakan pembangunan di kampung Mimin yaitu tentang Peranan Manajemen Kepemimpinan Kepala Kampung dalam pelaksanaan pembangunan kampung sehingga judul yang penulis diangkat adalah Manajemen Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Mimin, Distn.. Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Manajemen pelaksanaan pembangunan khususnya di kampung Mimin masih harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah, salah satunya sistem pengabdiaan yang handal yang di landasi dengan iman dan takwa serta tepat untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin di masa sekarang dan masa akan datang serta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas demi bangsa dan negara secara umum dan terlebih khususnya di kampung Mimin, Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Fungsi di atas, merupakan konsep yang dikemukakan oleh Flipppo dalam bukunya yang berjudul Manajemen Personalialia (1990: 60).

Berbicara masalah manajemen ini merupakan salah satu hal yang sangat urgen bagi setiap orang bahkan bangsa dan negara karena salah satu kelemahan dari banyak pemimpin di masa sekarang adalah dorongan untuk mengadakan survei. Hal ini terjadi dalam bidang politik, dan juga di gereja. Seseorang pemimpin haruslah lebih dari sekedar menyenangkan hati manusia tetapi selebihnya harus menyenangkan hati Allah. Kalau kebutuhan kita akan penegasan orang-orang melampaui kebutuhan kita akan penegasan Allah, maka kita akan mengalami kesulitan, sebab orang-orang yang kita pimpin adalah makhluk ciptaan Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa-Nya (Kejadian 1:26-27), oleh Jhon C. Maxwell dalam bukunya yang berjudul kekuatan kepemimpinan (*the power of leadership*), (2002: 18-19).

Kepemimpinan yang paling efektif adalah lewat teladan, bukan hanya melalui pendidikan.

Hampir cara orang belajar adalah visual, apakah yang mereka lihat mata saja dari pembelajaran kita adalah lisan, atau apa yang kita dengar kemudian sisanya adalah lewat indera kita.

Dengan demikian masyarakat Kampung Mimin telah mengetahui bahwa kepala kampung adalah merupakan pemerintah terkecil yang memimpin mereka di kampung. Melalui sosok seorang pemimpin kepala kampung masyarakat sebagian besar bisa dapat menikmati pembangunan secara bergotong royong, merata dan menyeluruh bahkan banyak hal juga yang belum pernah merasakan maupun melihat bisa dapat merasakan semua itu hanya karena lewat kepala kampung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian ini dengan judul *Manajemen Kepemimpinan Kepala Kampung dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Mimin, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua*.

METODE

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu metode yang membicarakan berdasarkan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data menyusun atau mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikannya, (Surakhman, 1978:27). Dalam penerapan metode ini peneliti tidak bermaksud mencari hubungan, sebab-akibat, melainkan berusaha memahami makna dari apa yang di pelajari. Adapun lokasi penelitian adalah Kampung Mimin, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pada Penelitian ini Menunjukkan bahwa:

Kemampuan Kepala Kampung Mimin dalam memimpin pemerintah kampung dinilai oleh responden sebagai berikut: Kategori jawaban " sangat baik " nilai jawaban baik hanya dua orang dengan persentase 8%, kategori jawaban " cukup baik" tercatat 4 responden atau 16 % dan jawaban " kurang baik sebanyak 19 orang atau 75 %. Suatu kondisi yang memperhatikan adalah selama memimpin Kepala Kampung Mimin dinilai belum bisa menunjukkan hasil kerja yang maksimal.

Perencanaan yang di bangun Kepala Kampung dengan aparat kampung menunjukkan kategori jawaban " sangat baik" nilai, jawaban " baik " hanya 3 orang dengan persentase 12%, kategori jawaban " cukup baik" tercatat 6 orang atau 24 % serta jawaban " kurang baik "sebanyak 16 orang atau 64%. Hal ini dapat menjelaskan bahwa perencanaan yang seharusnya dijadikan sebagai alat prekat dalam membangun koordinasi kerja, ternyata belum atau kurang di perhatikan oleh Kepala Kampung Mimin tersebut. Masyarakat yang seharusnya mengetahui program-program kerja kepala kampung melalui adanya kerja komunikasi dengan pihak kepala kampung, ternyata tidak menunjukan angka yang signifikan. Pada tabel 7. diatas, diperoleh jawaban " cukup baik" sebanyak 11 orang persentase 44 % dan kategori jawaban " kurang baik" tercatat sebanyak 14 orang atau 56%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keberadaan kepala kampung Mimin distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang yang oleh

masyarakat diharapkan dapat menginformasikan perkembangan kampung melalui komunikasi antara dua pihak ternyata belum maksimal. Tanggapan responden tentang pengawasan pada tabel 8. Tersebut dan menunjukkan kategori jawaban " cukup baik " 8 orang dengan jumlah persentase 32% dan kategori jawaban " kurang baik " sebanyak 17 orang dengan persentase mencapai 68 %. Adapun kategori " sangat baik kategori jawaban " baik" tidak diisi oleh responden atau nilai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang di bangun oleh Kepala Kampung Mimin dengan para aparaturnya kampung dapat di kategorikan sebagai kurang baik.

Setiap pekerjaan yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan, pada akhirnya akan dinilai pertanggungjawabannya oleh masyarakat. Hal ini berlaku pada sosok Kepala Kampung Mimin, yang oleh responden memberi penilaian sebagai berikut Kategori jawaban " baik" yakni 4 orang dengan persentase 16%, begitu 7 pula jawaban "cukup baik" memilih nilai yang sama yaitu 4 orang atau 16% sedangkan jawaban "kurang baik" tercatat sebanyak 17 orang responden atau sebesar 68%. Hubungan kerja dibangun Kepala Kampung Mimin dengan para kepala kampung lainnya yang ada di Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang oleh responden dinilai baik, yakni kerja sama sebagaimana dalam tabel 11. Tersebut di atas Kategori jawaban "sangat baik" sebanyak 4 orang atau 16%, kategori jawaban "baik" tercatat 12 orang atau 48%, jawaban "cukup baik" sebanyak 4 orang dengan besarnya persentase 16%, serta jawaban "kurang baik" tercatat sebanyak 5 orang atau sebesar 20%. Keadaan ini memperlihatkan bahwa Kepala Kampung Mimin lebih memperhatikan hubungan luar di bandingkan dengan membangun hubungan kerja dengan lingkup kerja yang terdekat.

Sosialisasi program-program kampung terhadap masyarakat yang di perhatikan pada tabel 12. Di ketahui sebagai berikut: kategori jawaban "sangat baik" 2 orang atau 8%, kategori jawaban "baik" tercatat 1 responden atau 4%, jawaban "cukup baik" sebanyak 4 orang dengan persentase 16%, dan jawaban "kurang baik" mencapai 72% dengan responden 18 orang. Hal ini dapat menjelaskan bahwa unsur-unsur terpenting dalam organisasi seperti komunikasi, kordinasi dan hubungan kerja yang di bangun oleh Kepala Kampung Mimin belum maksimal, sehingga hal ini jelas mempengaruhi kegiatan sosialisasi.

Pembangunan infrastruktur yang di bangun Kepala Kampung Mimin dengan aparat yang ada di Kampung Mimin, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang oleh responden di nilai baik, yakni sebagaimana di perhatikan dalam tabel 14. tersebut di atas. Kategori jawaban "sangat baik" hanya 1 orang atau 4%, kategori jawaban "baik" tercatat 2 orang atau 8%, jawaban "kurang baik" sebanyak 18 orang dengan besarnya persentase 72 % serta jawaban "cukup baik" tercatat 4 orang responden atau sebesar 16%. Keadaan ini memperhatikan bahwa Kepala Kampung Mimin lebih mengutamakan prinsip primordialisme di bandingkan dengan kepentingan umum di lingkup kerjanya yang terdekat.

Pembangunan ekonomi rakyat didalam pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi rakyat kampung maka dapat di ketahui jawaban dari semua responden memiliki kategori sebagai berikut : Kategori jawaban "sangat baik" nilai, jawaban "baik" hanya 3 orang dengan persentase

12 %, jawaban "cukup baik" mencapai 16% dengan responden berjumlah 4 orang dan kategori jawaban " kurang baik" sebanyak 18 orang atau 72%. Meskipun kepemimpinan kepala Kampung Mimin dalam menjalankan manajemennya terdapat beberapa kekurangan, akan tetapi hal ini tidak berarti masyarakat pada kampung tersebut bersikap patis terhadap program-program kerja yang perlu didukung untuk kelancaran pembangunan.

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat ternyata berdampak terhadap keterlibatan masyarakat secara material masyarakat dalam bentuk material karena pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari terasa berat. Hal ini tidak mampu di penuhi oleh masyarakat dalam memberikan bantuan untuk pembangunan kampung. Tabel 17. Menunjukkan jawaban "baik" sebanyak 3 orang atau 12%, jawaban "cukup baik" sebanyak 4 orang atau sebesar 16 %, jawaban "kurang baik" sebanyak 18 responden atau mencapai 72 %.

Kerja sama yang dibangun oleh Kepala Kampung Mimin dengan masyarakat setempat tampak belum maksimal karena beberapa faktor selama ini kurang diperhatikan oleh Kepala Kampung Mimin. Beberapa faktor antara lain kurang adanya komunikasi, kurangnya koordinasi, dan kurangnya pendekatan terhadap para tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya yang ada di kampung tersebut. Tabel. 18. Memperlihatkan jawaban "baik " hanya 2 orang atau 8%, jawaban "cukup baik" tercatat 8 responden atau 32%, serta Jawaban "kurang baik" mencapai 15 orang dengan besaran persentase 60%.

Pembahasan terkait hasil penelitian dan kajian teori Adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala kampung dalam bidang manajemen diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat dikatakan sangat kurang baik dalam menunjang kepemimpinan kepala kampung tersebut. Faktor-faktor yang dipandang belum maksimal yaitu tentang kemampuan memimpin Kepala Kampung Mimin sebagai mana diperhatikan dalam tabel 5 dimana penilaian responden bahwa kemampuan memimpin menunjukkan angka yang signifikan yaitu mencapai 76%. Selain faktor yang di pandang belum maksimal yakni kemampuan kepala kampung dalam membangun perencanaan, dimana hasil penilaian responden bahwa kategori jawaban "kurang baik" tercatat sebesar 64% (tabel.6).

Komunikasi ini mencakup komunikasi kepala kampung, baik dengan apart kampung lainnya maupun dengan anggota masyarakat yang masih berada dalam wilayah kerjanya. Kurang komunikasi Kepala Kampung Mimin, pada akhirnya berdampak pula pada pengawasan kerja dengan para aparat Kampung dan juga dengan masyarakat yang rata-rata dinilai kurang baik karena mencapai 68% hingga 76% sebagaimana diperhatikan dalam tabel 8 dan tabel 9.

Adapun tanggung jawab Kepala Kampung terhadap tugas atau pekerjaan yang dilakukannya tampak belum maksimal, meskipun terhadap penilaian dalam kategori jawaban " baik" sebesar 16 %. Suatu kondisi yang masih harus diperbaiki, mengingat masyarakat yang dipimpin pada hakekatnya menginginkan kelancaran pembangunan kampung tersebut dan juga manfaat yang dapat dirasakan

sebagaimana adanya kegiatan pembangunan kampung tersebut. Adapun hubungan kerja Kepala Kampung Mimin dengan Kepala Kampung lainnya seperti Kepala Kampung Atenar, Kampung Bumbakon, Kampung Palim, Kampung Oktumi dan lainnya dapat dikatakan belum maksimal.

Hal ini disebabkan karena selain kondisi jalan yang belum baik, dan juga letak geografisnya kampung-kampung tersebut dengan Kampung Mimin dapat dikatakan cukup jauh bila ditempu dengan berjalan kaki kurang lebih 35 kilo meter. Adapun tentang sosialisasi program-program kerja kampung yang seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa yang mereka harus lakukan dalam membantu pemerintah kampung tersebut. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang Kepala Kampung yang dalam hal ini Kepala Kampung Mimin pada akhirnya dinilai hasil kerjanya. Hasil kerja yang dicapai oleh Kepala Kampung Mimin dan responden dinilai kurang baik yakni 76% sebagaimana tertera dalam tabel 13.

Hakekat dari pembangunan yang dilakukan terhadap suatu masyarakat tertentu melibatkan berbagai pihak, pemerintah baik negeri maupun swasta, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat diharapkan karena mereka inilah sasaran dan pelaku utama dalam proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Mimin yang berkaitan dengan masalah keterlibatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Meskipun manajemen kepemimpinan Kepala Kampung Mimin ditemukan berbagai kekurangan, akan tetapi hal ini bukan berarti masyarakat pada kampung tersebut tidak terlibat dalam pembangunan kampung. Hasil penelitian yang penulis lakukan membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat Kampung Mimin dalam bentuk secara materil dapat dikatakan baik yakni mencapai 72%. Suatu kondisi yang menunjukkan bahwa berbagai kegiatan pembangunan yang membutuhkan tenaga manusia telah disumbangkan untuk kepentingan bersama.

Hal ini disebabkan oleh manajemen tokoh adat dan pihak Gereja / tokoh agama yang memotivasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan Kampung Mimin tersebut. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam bentuk pikiran yang diberikan masyarakat dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini erat kaitannya dengan pengetahuan/tingkat pendidikan masyarakat yang kebanyakan hanya lulusan sekolah dasar (SD) bahkan tidak bersekolah sehingga mereka tidak banyak memberikan sumbang pikiran untuk kepentingan pembangunan kampung tersebut.

Berbagai kekurangan yang terjadi khususnya dalam bekerja sama Kepala Kampung dengan masyarakat ternyata berdampak pula terhadap kerja sama Kepala Kampung dengan masyarakat setempat. Suatu hal yang berbagai kekurangan yang terjadi khususnya dalam bekerja sama Kepala Kampung dengan masyarakat ternyata berdampak pula terhadap kerja sama Kepala Kampung dengan masyarakat setempat. Suatu hal yang dapat dikatakan wajar apabila komunikasi tidak dibangun dengan baik antara Kepala Kampung dengan masyarakat, diperhatikan dalam tabel 18 dimana kategori jawaban "kurang baik" mencapai 60%.

KESIMPULAN DAN SARAN:

Berdasarkan uraian dan analisis data dari Manajemen Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kampung Mimin, Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Mimin, Distrik Oksibil, merupakan roda penggerak pembangunan atau sebagai motivator, juga aspirator tetapi belum di laksanakan secara efisien dan efektif dalam aparatur Kampung Mimin, terutama Kepala Kampung Mimin dia belum ada penegasakan kepada stafnya maka pembangunan kurang begitu kelihatan dan tidak berjalan sesuai dengan program-program yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Pelakasaan pembangunan di Kampung Mimin, Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan bintang belum di laksanakan secara maksimal sehingga masih terdapat kekurangan dalam hal infrastruktur, pengembangan aparatur dan pembangunan ekonomi rakyat.
3. Terhambatnya pelaksanaan pembangunan pada Kampung Mimin di sebabkan juga adalah denagn adanya pengaruh dari cara kepemimpinan Kepala Kampung yang ada. Apabila Kepala Kampung kurang memainkan manajemennya dalam hal memberikan motivasi, pengawasan, koordinasi, evaluasi maupun dalam laporan pertanggung jawaban program kerja dan hubungan kerja antara aparat kampung dan masyarakat kampung lainnya. Sedangkan hubungan antara Kepala Kampung Mimin dengan Kepala Kampung lainnya hanya mencapai 16 % itupun menurut responden kemudian yang belum mencapai 48%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Manajemen Kepala Kampung harus benar-benar memberikan semangat dalam pelaksanaan pembangunan kampung, agar semangat tersebut dapat memberikan motivasi bagi para pelaksana pembangunan kampung yang dipimpinnya.
2. Sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945' ternayata Wilayah Kampung Mimin, Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang secara umum, masih saja dalam keterisolasian dan keterbelakangan dalam berbagai bidang pembangunan kesejahteraan rakyat, fasilitas umum maupun khusus di badingkan dengan kampung-kampung lainnya yang berada di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang secara umum, pada hal kalau kita melihat dari segi teoritis bahwa Provinsi Papua di berikan Otonomi Khusus dengan maksud anak putra daerah mengatur rumah tangganya sendiri atau disebut sebagai tuan di negeri sendiri namun masih saja diikat oleh sistem yang berlaku di NKRI sehingga pemerintah harus diperhatikan hal ini.
3. Dengan adanya Otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Maka dengan ini penulis menyampaikan kepada pemerintah agar betul-betul mencermati dan memahami masalah ini dengan baik agar pelaksanaan pembangunan dalam peningkatan manajemen dan peningkatan kesejahteraan rakyat

- benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat berjalan baik demi peningkatan sumber daya manusia Papua khususnya di Kampung Mimin Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang.
4. Pemerintah perlu perhatian serius kepada kinerja aparatur pemerintahan kampung terutama pada pejabat-pejabat birokrat agar memiliki kesadaran yang tinggi akan suatu nilai etika dan moral yang berdasarkan pada iman dan takwa agar dalam menjalankan tugas-tugasnya benar-benar dapat menyentu masyarakat sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan, C., Loise, G. W. (1989). *Sistem Pengendalian Manajemen Alih Bahasa: Agus Maulana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Bintoro, T. (1981). *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Dayan, A. (1973). *Metode Penelitian Sosial*. Yongyakarta.
- Flipo, E. (1990). *Manajemen Personalia*. Erlangga. Jakarta.
- Ibnu, S. (1988). *Teori Organisasi*. Arloka. Surabaya.
- Kartono, K. (1996). *Metode Penelitian Sosial*. Gramedia Indonesia. Jakarta.
- Kast, F. (1990). *Organiasi dan Manan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kartono. (1990). *Pengantar Metodologi*. Mandar Maju. Bandung.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Moeliono, A. M., dkk. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depdikbud. Balai Pustaka Jakarta.
- Moekijat. (1990). *Kamus Manajemen*. Mandar Maju. Bandung.
- Mubyarto. (1988). *Pembangunan Masyarkat Pedesaan*. Kanisius. Jogyakarta.
- Nasir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nawawi, H. (1983). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Nitisemito, A. (1990). *Manajemen Personalia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Poerwadarminta. (1990). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Utama. Jakarta.
- Sadirman, A. (1978). *Metode Penelitian Mencari Hubungan*. Erlangga. Jakarta.
- Sutarto. (1999). *Dasar- Dasar Organisasi*. Angkasa. Jakarta.
- Siagian. (1980). *Manajemen (Kerangka-Kerangka Pokok), "Filsafat Adminitrasi"*. Bharatara Karya Aksara yang disusun Drs. Alet Gumur. Jakarta.
- Siagian, P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rajawali. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.

Yuwono, T. (1994). *Kamus Kecil Bahasa Indonesia*. Arloka. Surabaya.